

PENDEKATAN NEW PUBLIC MANAGEMENT DALAM PENATAAN LALU LINTAS DAN ESTETIKA DI KOTA CIMAH

Lukman Hakim¹⁾, Dede Sri Kartini²⁾

1) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Indonesia

2) Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: lukman24001@mail.unpad.ac.id

Abstrak: Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu tantangan krusial dalam tata kelola kota, khususnya di kawasan urban seperti Cimahi. Studi ini mengkaji implementasi pendekatan *New Public Management* (NPM) dalam kebijakan pembongkaran median jalan di kawasan Alun-Alun Cimahi sebagai respons terhadap permasalahan kemacetan dan disintegrasi estetika kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang berfokus pada proses kebijakan, partisipasi aktor, serta dampak kebijakan terhadap efektivitas lalu lintas dan kualitas ruang kota. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan ini mencerminkan prinsip-prinsip inti NPM, seperti efisiensi pelayanan publik, orientasi pada hasil, dan kepemimpinan publik yang proaktif. Pembongkaran median jalan terbukti mampu memperlancar arus lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas antar sisi jalan, serta memperkuat konektivitas ekonomi mikro. Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan perhatian terhadap aspek estetika dan kenyamanan pengguna ruang kota. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini memerlukan dukungan sistemik seperti penataan parkir, pengamanan pejalan kaki, dan pemantauan berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan NPM dapat diadaptasi dalam konteks tata kelola lokal, asalkan didukung oleh kepemimpinan yang solutif, koordinasi lintas sektor, dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga.

Kata kunci: *New Public Management*, tata kelola kota, kemacetan lalu lintas, estetika ruang, kebijakan publik, Cimahi.

Abstract: *Traffic congestion is one of the most critical challenges in urban governance, particularly in rapidly growing cities like Cimahi. This study examines the implementation of the New Public Management (NPM) approach in the policy of dismantling the road median in the Alun-Alun Cimahi area as a response to traffic congestion and urban aesthetic disintegration. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, the research focuses on the policy process, stakeholder involvement, and the impact of the policy on traffic effectiveness and urban space quality. The findings indicate that the policy reflects the core principles of NPM, such as public service efficiency, result-oriented governance, and proactive public leadership. The dismantling of the median road has successfully improved traffic flow, increased accessibility across both sides of the street, and enhanced the connectivity of microeconomic activities. Moreover, the policy also demonstrates attention to the aesthetics and user-friendliness of public spaces. However, the effectiveness of this policy requires systemic support, including organized parking, pedestrian safety infrastructure, and continuous evaluation. The study concludes that the NPM approach can be adapted to local governance contexts, provided it is supported by solution-oriented leadership, cross-sectoral coordination, and policies that are responsive to community needs.*

Keywords: *New Public Management, urban governance, traffic congestion, urban aesthetics, public policy, Cimahi.*

PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan kronis yang kerap membelenggu perkembangan kota-kota di Indonesia. Fenomena ini bukan sekadar soal padatnya kendaraan di jalan, melainkan cerminan dari persoalan tata kelola ruang kota, pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur, serta lemahnya perencanaan dan penataan sistem transportasi (Nugroho, 2011, hal. 23-45). Kota Cimahi, sebagai bagian dari kawasan metropolitan Bandung Raya, menjadi salah satu daerah yang terdampak langsung oleh pertumbuhan mobilitas warga, khususnya pada jalur utama seperti Jalan Jenderal Amir Machmud. Ruas jalan ini menjadi jalur vital penghubung Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung, serta hampir setiap hari mengalami kemacetan parah, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari (Cimahi D. , 2004).

Kemacetan yang terus-menerus terjadi tidak hanya berdampak pada penurunan efisiensi transportasi, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi lokal, menyebabkan peningkatan polusi udara, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat (Bappeda Cimahi, 2023). Waktu tempuh yang semakin panjang, stres psikologis akibat ketidakpastian perjalanan, serta penurunan daya tarik ruang publik menjadi isu nyata yang dihadapi oleh warga Cimahi. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah konkret dengan membongkar median jalan di sepanjang kawasan Alun-alun, sebagai upaya untuk mengurai kemacetan dan sekaligus menata estetika kota pada 5 Mei 2025 (Cimahi, 2025).

Langkah ini bukan sekadar keputusan teknis, tetapi merupakan bagian dari strategi kebijakan publik yang berorientasi pada hasil. Wali Kota Cimahi dan jajarannya menilai bahwa pembongkaran median jalan dapat membuka jalur kendaraan yang lebih fleksibel, memperlancar arus lalu lintas, serta menghilangkan hambatan akses antar sisi jalan (Kompas, 2025). Selain itu, tindakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses ke pusat-pusat ekonomi mikro seperti toko dan warung yang sebelumnya terisolasi akibat keberadaan pembatas jalan. Di sinilah relevansi pendekatan *New Public Management* (NPM) menjadi signifikan (Osborne, 1992, hal. 67-89).

Dari perspektif akademik, kajian ini penting karena menghubungkan antara praktik kebijakan lokal dengan kerangka teori manajemen sektor publik modern. Kebijakan publik tidak lagi dipahami sekadar sebagai hasil perencanaan birokratis yang top-down, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara aktor negara dan masyarakat yang dinamis, responsif, dan berbasis hasil nyata (Hughes, 2003, hal. 112-134). Oleh karena itu, pembongkaran median jalan di Cimahi dapat diposisikan sebagai studi kasus yang menggambarkan penerapan *New Public Management* dalam konteks perkotaan Indonesia, yang selama ini sering dihadapkan pada kompleksitas persoalan lalu lintas, ketimpangan ruang, dan keterbatasan infrastruktur (Dwiyanto, 2018, hal. 45-67).

Dengan kata lain, kebijakan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dalam manajemen sektor publik di tingkat lokal dari birokrasi yang normatif ke arah pemerintahan yang solutif, pragmatis, dan partisipatif. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk melihat sejauh mana pendekatan NPM dapat diadaptasi dalam konteks lokal dan bagaimana implikasinya terhadap tata kelola kota yang lebih efektif, efisien, dan inklusif (Hood, 1991).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan pendekatan *New Public Management* (NPM) dalam kebijakan penataan lalu lintas dan estetika kota melalui pembongkaran median jalan di kawasan Alun-Alun Kota Cimahi (Moleong, 2017, hal. 6-7). Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena kebijakan publik yang bersifat kontekstual, kompleks, dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial serta dinamika aktor di dalamnya (Yin, 2018, hal. 15-17).

Jenis penelitian ini adalah studi kebijakan publik, dengan pendekatan kualitatif interpretatif yang menekankan pada pemaknaan terhadap kebijakan publik berdasarkan perspektif aktor dan konteks lokal. Studi ini berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu kebijakan pembongkaran median jalan oleh Pemerintah Kota Cimahi pada Mei 2025, dan dianalisis dalam kerangka teori *New Public Management* (Osborne, 1992, hal. 45-47).

Lokasi penelitian ini adalah kawasan Alun-Alun Cimahi, khususnya sepanjang Jalan Jenderal Amir Machmud. Objek penelitian meliputi kebijakan pembongkaran median jalan, proses implementasinya, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap efektivitas dan dampaknya terhadap lalu lintas dan estetika kota (Cimahi B. , 2020, hal. 29-30).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, diantaranya studi dokumentasi, yaitu penelusuran dokumen resmi, berita daring, pernyataan pers, dan regulasi

pemerintah daerah terkait kebijakan pembongkaran median jalan. Serta observasi lapangan, yang dilakukan untuk mencermati kondisi aktual sebelum dan sesudah pembongkaran median jalan, termasuk perubahan lalu lintas, aksesibilitas, dan tata ruang kawasan (Sugiyono, 2019, hal. 66–70).

Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola, kategori, dan tema yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *New Public Management*. Peneliti mengaitkan temuan lapangan dengan teori-teori manajemen sektor publik, seperti efisiensi pelayanan, akuntabilitas, orientasi pada hasil (*result-oriented*), serta keterlibatan aktor publik sebagai *public entrepreneurs* (Hood, 1991, hal. 7-11).

Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari dokumen, wawancara, dan observasi. Sementara triangulasi metode melibatkan kombinasi pendekatan deskriptif dan interpretatif dalam memahami fenomena kebijakan publik secara holistik (Patton, 2002, hal. 556–560).

PEMBAHASAN

Secara teoritis, pendekatan *New Public Management* lahir dari kritik terhadap birokrasi tradisional yang kaku, lambat, dan tidak responsif terhadap kebutuhan publik. NPM menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan (Hughes, 2003, hal. 50-52). Dalam konteks kebijakan pembongkaran median jalan di Cimahi, pendekatan ini tercermin dalam beberapa hal, diantaranya :

Implementasi Kebijakan: Respons Cepat dan Kepemimpinan Partisipatif

Berdasarkan observasi lapangan dan dokumentasi media, pelaksanaan pembongkaran median jalan di sepanjang kawasan Alun-Alun Cimahi pada 5 Mei 2025 dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kota Cimahi, dipimpin oleh Letkol (Purn.) Ngatiyana (Wali Kota Cimahi) dan Adhithia Yudisthira (Wakil Wali Kota Cimahi). Keterlibatan langsung kepala daerah dalam eksekusi kebijakan ini menunjukkan pendekatan manajerial yang khas dalam kerangka *New Public Management*, yaitu kepemimpinan yang proaktif, responsif, dan berorientasi pada hasil (*result-driven governance*).



Gambar 1. Proses Pembongkaran Median Jalan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi. Sumber: Akun instagram @adhitiayudisthira

Sikap turun langsung ke lapangan serta interaksi langsung dengan warga dan pelaku usaha memperlihatkan praktik *public entrepreneurship*—konsep dalam NPM di mana aktor publik bertindak seperti wirausahawan sosial, menginisiasi perubahan, dan menangani masalah tanpa menunggu instruksi hierarkis. Ini juga menunjukkan pergeseran dari birokrasi konvensional ke arah birokrasi yang solutif dan adaptif.

Efektivitas Penanganan Kemacetan: Efisiensi dan Aksesibilitas

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa setelah pembongkaran median jalan, arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Cimahi menjadi lebih lancar, terutama pada waktu-waktu rawan kemacetan seperti pagi dan sore hari. Jalur kendaraan menjadi lebih fleksibel karena penghapusan pembatas jalan yang sebelumnya mempersempit ruang gerak kendaraan. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi pelayanan publik dalam kerangka NPM, di mana sistem dibuat sesederhana mungkin untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal.

Selain kelancaran lalu lintas, terjadi peningkatan aksesibilitas antar sisi jalan. Sebelumnya, median jalan yang permanen menyulitkan pengendara dan pejalan kaki untuk melintasi atau berbalik arah. Dengan penghapusan median, masyarakat kini lebih mudah menjangkau pusat-pusat ekonomi lokal seperti toko dan warung, yang turut meningkatkan potensi ekonomi mikro di kawasan tersebut. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik dapat dirancang secara multi-benefit mengintegrasikan aspek transportasi, ekonomi, dan sosial dalam satu keputusan kebijakan.

Dimensi Estetika dan Ruang Kota: Pendekatan Humanistik

Aspek estetika dan psikologis pengendara juga menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan ini. Ruas jalan yang sebelumnya terbagi oleh pembatas kini terlihat lebih lapang dan terintegrasi secara visual, mengurangi kesan sempit dan sesak yang dapat memicu stres pengendara. Pemerintah Kota Cimahi juga berencana untuk mengganti jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan *pelican crossing* yang lebih fungsional, serta memperbaiki trotoar dan area parkir. Ini menunjukkan perhatian terhadap kualitas lingkungan kota dan kenyamanan warga, yang dalam konteks NPM dapat dipahami sebagai bagian dari pelayanan publik yang berorientasi pada *customer satisfaction*.

Penataan ulang ini juga memperlihatkan bahwa kebijakan tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga untuk membentuk wajah kota yang lebih manusiawi, estetis, dan layak huni. Dalam kerangka teori manajemen sektor publik, ini mencerminkan penguatan dimensi *outcome-based governance*, di mana keberhasilan kebijakan diukur tidak hanya dari output, tetapi juga dari dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

Kritik dan Potensi Risiko

Meskipun kebijakan ini banyak diapresiasi karena dinilai cepat dan tepat sasaran, namun terdapat potensi risiko yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya penyeberangan jalan yang tidak tertib akibat ketiadaan pembatas, yang bisa membahayakan keselamatan pejalan kaki jika *pelican crossing* tidak segera tersedia. Selain itu, jika penataan parkir dan trotoar tidak segera ditindaklanjuti, maka potensi kemacetan bisa kembali terjadi karena penyempitan badan jalan akibat parkir liar.

Hal ini menunjukkan pentingnya kesinambungan implementasi dan evaluasi kebijakan, agar prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dalam NPM benar-benar terwujud secara menyeluruh. Tanpa pengawasan dan perencanaan lanjutan, kebijakan ini bisa menghasilkan dampak jangka pendek yang positif, namun gagal memberikan transformasi sistemik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembongkaran median jalan di kawasan Alun-Alun Cimahi merupakan implementasi nyata dari pendekatan *New Public Management* (NPM) dalam tata kelola perkotaan. Pemerintah Kota Cimahi, melalui keterlibatan langsung kepala daerah dan pelibatan masyarakat, menampilkan pola kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata ciri khas NPM yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kebijakan ini tidak hanya berhasil mengurangi kemacetan pada ruas jalan utama, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal serta memperbaiki

estetika ruang kota. Selain itu, intervensi ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari birokrasi yang normatif dan prosedural ke arah manajemen publik yang lebih pragmatis dan berfokus pada kebutuhan warga.

Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan berbasis NPM sangat bergantung pada kesinambungan implementasi, koordinasi antar sektor, dan evaluasi berkala terhadap dampaknya. Tanpa perencanaan lanjutan terhadap penataan parkir, keselamatan pejalan kaki, dan infrastruktur penunjang lainnya, potensi gangguan lalu lintas dan risiko keselamatan masih bisa terjadi.

Dengan demikian, pembongkaran median jalan di Cimahi dapat dijadikan sebagai model pembelajaran bagaimana prinsip-prinsip *New Public Management* dapat diadaptasi secara kontekstual dalam lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola perkotaan yang integratif dan humanistik sebagai fondasi menuju kota yang lebih efisien, inklusif, dan layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cimahi. Dokumen RPJMD Kota Cimahi 2023–2028.
- Bappeda Kota Cimahi. *Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cimahi 2020–2040*, hlm. 29–30.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2013, hlm. 76–83.
- Dinas Perhubungan Kota Cimahi. “Laporan Kondisi Lalu Lintas Tahunan 2024.”
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Hood, Christopher. “A Public Management for All Seasons?” *Public Administration*, Vol. 69, No. 1, 1991, pp. 3–19.
- Hood, Christopher. “A Public Management for All Seasons?” *Public Administration*, Vol. 69 No. 1, 1991, hlm. 7–11.
- Hughes, Owen. *Public Management and Administration: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Kompas. “Cimahi Bongkar Median Jalan untuk Atasi Kemacetan.” *Kompas.com*, 6 Mei 2025.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6–7.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Osborne, D. & Gaebler, T. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Addison-Wesley, 1992.
- Osborne, D., & Gaebler, T. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Addison-Wesley, 1992, hlm. 45–47.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2002, hlm. 556–560.
- Pemerintah Kota Cimahi. “Press Release: Pembongkaran Median Jalan Alun-alun Cimahi.” Diakses Mei 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 66–70.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018, hlm. 15–17.